



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional terdapat perubahan standar harga satuan regional sehingga perlu dilakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
16. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 7/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 7/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c dan huruf d ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota dari terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dari Tempat Tujuan.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi udara; dan/atau
 - c. transportasi laut.
- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD diberikan uang transportasi kelas eksekutif;
 - b. alat transportasi darat yang digunakan dapat berupa kereta api, bus, travel, dan/atau sewa kendaraan;
 - c. sewa kendaraan atau taksi bagi DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD jika perjalanan dinas dilakukan 3 (tiga) orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan tetap memperhitungkan kapasitas penumpang;
 - d. biaya transportasi darat bagi DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi;
 - e. perkiraan besaran biaya transportasi darat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini; dan
 - f. biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada huruf e dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD diberikan transportasi udara kelas bisnis;
 - b. perjalanan dinas Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD diberikan transportasi udara kelas ekonomi;
 - c. perkiraan biaya transportasi udara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;

- d. biaya transportasi udara dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - e. apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, biaya transportasi udara dibayarkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD diberikan transportasi kelas eksekutif;
 - b. besaran perkiraan biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
 - c. biaya transportasi laut dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, biaya transportasi laut dibayarkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
- (6) Biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas Pejabat Negara diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota;
- b. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban;
- c. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- d. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- e. perjalanan dinas Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan pegawai BLUD diberikan biaya taksi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) kali perjalanan dinas yakni;
 1. biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal menuju bandara;
 2. biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal/bandara keberangkatan menuju hotel/lokasi;
 3. biaya taksi kepulangan dari hotel/lokasi menuju stasiun/terminal/bandara; dan
 4. biaya taksi kepulangan dari bandara menuju stasiun/terminal;
- f. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
- g. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban;
- h. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Uang Harian dan Uang Representasi perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang Harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai BLUD, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam;
- b. penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan;
- c. Uang Harian diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- d. perhitungan Uang Harian yaitu jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPPD;
- e. Uang Representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- f. perhitungan Uang Representasi yaitu jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD;
- g. Perjalanan Dinas Keluar Daerah selain diberikan Uang Harian, uang transportasi, dan Uang Representasi juga diberikan uang penginapan;
- h. Perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari;

- i. Perjalanan Dinas Keluar Daerah selain diberikan Uang Harian, uang transportasi, dan Uang Representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum jam 08.00 WIB;
- j. Perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum jam 08.00 WIB;
- k. Perjalanan Dinas Keluar Daerah selain diberikan Uang Harian, uang transportasi, dan Uang Representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari jam 19.00 WIB;
- l. perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari jam 19.00 WIB;
- m. perjalanan selain dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf l dengan mempertimbangkan jarak dan waktu dapat diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari;
- n. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf j harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain:
 1. SPTJM menggunakan kendaraan dinas, bukti moda transportasi bus, kereta api, atau sewa kendaraan berangkat sebelum tanggal pelaksanaan; atau
 2. bukti penginapan;
- o. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf l harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain:
 1. SPTJM menggunakan kendaraan dinas, bukti moda transportasi bus, kereta api, sewa kendaraan pulang setelah tanggal pelaksanaan; atau
 2. bukti penginapan;

- p. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/Pegawai ASN/Pegawai BLUD yang meninggal dunia saat melaksanakan dinas; dan
- q. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai ASN/Pegawai BLUD yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Perjalanan Dinas Luar Daerah mengantar/menjemput ke tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i dan huruf j dilakukan oleh paling banyak 6 (enam) orang dalam waktu yang sama untuk 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas.

4. Ketentuan Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Lampiran XVII dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 Agustus 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 27/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA SEWA KENDARAAN	
		SATUAN	RODA 4
1	Aceh	Per hari	3,500,000
2	Sumatera Utara	Per hari	3,500,000
3	Riau	Per hari	3,500,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	3,500,000
5	Jambi	Per hari	3,500,000
6	Sumatera Barat	Per hari	3,500,000
7	Sumatera Selatan	Per hari	3,500,000
8	Lampung	Per hari	3,500,000
9	Bengkulu	Per hari	3,500,000
10	Bangka Belitung	Per hari	3,500,000
11	Banten	Per hari	3,500,000
12	Jawa Barat	Per hari	3,500,000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	3,500,000
14	Jawa Tengah	Per hari	3,500,000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	3,500,000
16	Jawa Timur	Per hari	3,500,000
17	Bali	Per hari	3,500,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	3,500,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	3,500,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	3,500,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	3,500,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	3,500,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	3,500,000
24	Kalimantan Utara	Per hari	3,500,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	3,500,000
26	Gorontalo	Per hari	3,500,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	3,500,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	3,500,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	3,500,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	3,500,000
31	Maluku	Per hari	3,500,000
32	Maluku Utara	Per hari	3,500,000
33	Papua	Per hari	3,500,000
34	Papua Barat	Per hari	3,500,000
35	Papua Barat Daya	Per hari	3,500,000
36	Papua Tengah	Per hari	3,500,000
37	Papua Selatan	Per hari	3,500,000
38	Papua Pegunungan	Per hari	3,500,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA TAKSI	
		SATUAN	BIAYA
1	Aceh	Orang/Kali	127,000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308,000
3	Riau	Orang/Kali	101,000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165,000
5	Jambi	Orang/Kali	147,000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190,000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179,000
8	Lampung	Orang/Kali	168,000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109,000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97,000
11	Banten	Orang/Kali	536,000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200,000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256,000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108,000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267,000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233,000
17	Bali	Orang/Kali	227,000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231,000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116,000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171,000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134,000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180,000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533,000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218,000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138,000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265,000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313,000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187,000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165,000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171,000
31	Maluku	Orang/Kali	288,000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215,000
33	Papua	Orang/Kali	513,000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236,000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236,000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513,000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513,000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitarja, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BIAYA PENGINAPAN

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA PENGINAPAN			
		KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ Golongan III/II/I/ PEGAWAI BLUD
1	2	3	4	5	6
A	Provinsi Jawa Timur				
1	Ngawi	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
2	Magetan	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
3	Ponorogo	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
4	Nganjuk	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
5	Pacitan	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
6	Trenggalek	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
7	Tulungagung	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
8	Kediri	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
9	Bojonegoro	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
10	Tuban	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
11	Blitar	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
12	Jombang	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
13	Mojokerto	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
14	Lamongan	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
15	Gresik	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
16	Surabaya	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
17	Sidoarjo	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
18	Pasuruan	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
19	Malang	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
20	Batu	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
21	Lumajang	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
22	Jember	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
23	Situbondo	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
24	Bondowoso	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
25	Probolinggo	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
26	Banyuwangi	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
27	Sampang	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
28	Bangkalan	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
29	Pamekasan	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000
30	Sumenep	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000

1	2	3	4	5	6
B	Provinsi Jawa Tengah				
1	Sragen	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
2	Wonogiri	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
3	Solo	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
4	Karanganyar	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
5	Boyolali	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
6	Temanggung	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
7	Wonosobo	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
8	Klaten	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
9	Magelang	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
10	Purworejo	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
11	Rembang	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
12	Kebumen	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
13	Pemalang	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
14	Semarang	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
15	Blora	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
16	Pati	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
17	Kendal	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
18	Kudus	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
19	Demak	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
20	Jepara	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
21	Grobogan	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
22	Pekalongan	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
23	Tegal	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
24	Brebes	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
25	Cilacap	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
26	Batang	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
27	Banyumas	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
28	Banjarnegara	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
29	Purbalingga	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000
C	Provinsi Yogyakarta				
1	Yogyakarta	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
2	Sleman	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
3	Kulon Progo	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
4	Gunung Kidul	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
5	Bantul	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
D	Provinsi Jawa Barat				
1	Indramayu	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
2	Cirebon	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
3	Karawang	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
4	Kuningan	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
5	Majalengka	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
6	Purwakarta	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
7	Subang	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
8	Ciamis	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000

1	2	3	4	5	6
9	Tasikmalaya	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
10	Cimahi	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
11	Bandung	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
12	Sumedang	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
13	Sukabumi	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
14	Garut	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
15	Cianjur	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
16	Bekasi	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
17	Bogor	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
18	Depok	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
E	Provinsi Banten				
1	Lebak	5,725,000	2,373,000	1,204,000	724,000
2	Pandeglang	5,725,000	2,373,000	1,204,000	724,000
3	Serang	5,725,000	2,373,000	1,204,000	724,000
4	Tangerang	5,725,000	2,373,000	1,204,000	724,000
5	Cilegon	5,725,000	2,373,000	1,204,000	724,000
F	Provinsi DKI Jakarta				
	Jakarta	8,720,000	2,063,000	992,000	730,000
G	Provinsi Luar Pulau Jawa				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4,420,000	3,526,000	1,533,000	770,000
2	Sumatera Utara	4,960,000	2,195,000	1,100,000	699,000
3	Riau	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000
4	Kepulauan Riau	5,344,000	2,310,000	1,297,000	792,000
5	Jambi	5,000,000	4,102,000	1,225,000	580,000
6	Sumatera Barat	5,236,000	3,332,000	1,353,000	701,000
7	Sumatera Selatan	5,850,000	3,083,000	1,955,000	861,000
8	Lampung	4,491,000	2,488,000	1,425,000	580,000
9	Bengkulu	2,140,000	1,628,000	1,546,000	692,000
10	Bangka Belitung	3,827,000	2,838,000	1,957,000	649,000
11	Bali	6,848,000	2,433,000	1,685,000	1,138,000
12	Nusa Tenggara Barat	4,375,000	2,648,000	1,418,000	907,000
13	Nusa Tenggara Timur	3,750,000	2,133,000	1,355,000	688,000
14	Kalimantan Barat	2,654,000	1,923,000	1,125,000	538,000
15	Kalimantan Tengah	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000
16	Kalimantan Selatan	4,797,000	3,316,000	1,500,000	697,000
17	Kalimantan Timur	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000
18	Kalimantan Timur	4,000,000	2,735,900	1,507,000	904,000
19	Sulawesi Utara	4,919,000	2,290,000	1,207,000	978,000
20	Gorontalo	4,168,000	3,107,000	1,606,000	955,000
21	Sulawesi Barat	4,076,000	3,098,000	1,344,000	704,000
22	Sulawesi Selatan	4,820,000	1,938,000	1,423,000	745,000
23	Sulawesi Tengah	2,309,000	2,027,000	1,679,000	951,000
24	Sulawesi Tenggara	3,088,800	2,574,000	1,297,000	786,000
25	Maluku	3,467,000	3,240,000	1,059,000	667,000
26	Maluku Utara	4,611,600	3,843,000	1,160,000	605,000

1	2	3	4	5	6
27	Papua	3,859,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000
28	Papua Barat	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000
29	Papua Barat Daya	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000
30	Papua Tengah	3,859,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000
31	Papua Selatan	5,673,000	4,877,000	3,706,000	1,526,000
32	Papua Pegunungan	5,711,000	4,911,000	3,731,000	1,536,000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *FULLBOARD*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON III KE BAWAH
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Per hari	1,732,000	1,075,000	1,075,000
2	Sumatera Utara	Per hari	1,350,000	1,011,000	1,011,000
3	Riau	Per hari	1,229,000	1,084,000	1,084,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	1,484,000	1,170,000	1,170,000
5	Jambi	Per hari	1,538,000	1,298,000	1,298,000
6	Sumatera Barat	Per hari	1,492,000	987,000	987,000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1,448,000	1,030,000	1,030,000
8	Lampung	Per hari	1,200,000	950,000	950,000
9	Bengkulu	Per hari	1,262,000	1,062,000	1,062,000
10	Bangka Belitung	Per hari	1,632,000	1,115,000	1,115,000
11	Banten	Per hari	1,752,000	1,201,000	1,201,000
12	Jawa Barat	Per hari	1,914,000	1,110,000	1,110,000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	2,257,000	1,347,000	1,347,000
14	Jawa Tengah	Per hari	1,576,000	919,000	919,000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	1,470,000	1,204,000	1,204,000
16	Jawa Timur	Per hari	2,159,000	1,784,000	1,784,000
17	Bali	Per hari	2,523,000	1,569,000	1,569,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1,413,000	1,213,000	1,213,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	2,013,000	1,294,000	1,294,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	1,247,000	1,047,000	1,047,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	2,092,200	1,902,000	1,902,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	1,340,900	1,219,000	1,219,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1,250,000	1,050,000	1,050,000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1,763,800	1,603,000	1,603,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	1,250,000	1,050,000	1,050,000
26	Gorontalo	Per hari	2,296,800	2,088,000	2,088,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	1,301,000	1,101,000	1,101,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	2,218,000	1,574,000	1,574,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	1,672,000	1,520,000	1,520,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	1,335,000	1,171,000	1,171,000

1	2	3	4	5	6
31	Maluku	Per hari	1,881,000	1,710,000	1,710,000
32	Maluku Utara	Per hari	1,220,000	1,050,000	1,050,000
33	Papua	Per hari	2,063,000	1,863,000	1,863,000
34	Papua Barat	Per hari	1,952,000	1,752,000	1,752,000
35	Papua Barat Daya	Per hari	1,952,000	1,752,000	1,752,000
36	Papua Tengah	Per hari	2,063,000	1,863,000	1,863,000
37	Papua Selatan	Per hari	3,033,000	2,739,000	2,739,000
38	Papua Pegunungan	Per hari	2,869,000	2,739,000	2,739,000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BESARAN UANG HARIAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KOTA

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	FULLBOARD
1	Aceh	Per hari	120,000
2	Sumatera Utara	Per hari	130,000
3	Riau	Per hari	130,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	130,000
5	Jambi	Per hari	130,000
6	Sumatera Barat	Per hari	120,000
7	Sumatera Selatan	Per hari	120,000
8	Lampung	Per hari	130,000
9	Bengkulu	Per hari	130,000
10	Bangka Belitung	Per hari	130,000
11	Banten	Per hari	120,000
12	Jawa Barat	Per hari	150,000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	180,000
14	Jawa Tengah	Per hari	130,000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	140,000
16	Jawa Timur	Per hari	140,000
17	Bali	Per hari	160,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	150,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	140,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	130,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	120,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	130,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	150,000
24	Kalimantan Utara	Per hari	150,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	130,000
26	Gorontalo	Per hari	130,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	120,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	150,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	130,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	130,000
31	Maluku	Per hari	120,000
32	Maluku Utara	Per hari	130,000
33	Papua	Per hari	200,000
34	Papua Barat	Per hari	160,000
35	Papua Barat Daya	Per hari	160,000
36	Papua Tengah	Per hari	200,000
37	Papua Selatan	Per hari	200,000
38	Papua Pengunungan	Per hari	200,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *FULLDAY*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON III KE BAWAH
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Per hari	663,000	575,000	575,000
2	Sumatera Utara	Per hari	675,000	511,000	511,000
3	Riau	Per hari	582,000	432,000	432,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	634,000	531,000	531,000
5	Jambi	Per hari	595,000	525,000	525,000
6	Sumatera Barat	Per hari	502,000	432,000	432,000
7	Sumatera Selatan	Per hari	718,000	502,000	502,000
8	Lampung	Per hari	577,000	512,000	512,000
9	Bengkulu	Per hari	538,000	468,000	468,000
10	Bangka Belitung	Per hari	714,000	582,000	582,000
11	Banten	Per hari	930,000	632,000	632,000
12	Jawa Barat	Per hari	799,000	692,000	692,000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	993,000	667,000	667,000
14	Jawa Tengah	Per hari	738,000	474,000	474,000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	607,000	507,000	507,000
16	Jawa Timur	Per hari	710,000	623,000	623,000
17	Bali	Per hari	907,000	650,000	650,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	800,000	713,000	713,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	1,046,000	602,000	602,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	617,000	547,000	547,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	679,000	609,000	609,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	545,000	475,000	475,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	750,000	478,000	478,000
24	Kalimantan Utara	Per hari	722,700	657,000	657,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	620,000	550,000	550,000
26	Gorontalo	Per hari	562,000	992,000	992,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	574,000	504,000	504,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	583,000	513,000	513,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	652,000	582,000	582,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	552,000	604,000	604,000

1	2	3	4	5	6
31	Maluku	Per hari	638,000	568,000	568,000
32	Maluku Utara	Per hari	693,000	623,000	623,000
33	Papua	Per hari	768,000	698,000	698,000
34	Papua Barat	Per hari	728,000	658,000	658,000
35	Papua Barat Daya	Per hari	728,000	658,000	658,000
36	Papua Tengah	Per hari	768,000	698,000	698,000
37	Papua Selatan	Per hari	1,129,000	1,026,000	1,026,000
38	Papua Pegunungan	Per hari	1,070,000	1,026,000	1,026,000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *HALFDAY*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON III KE BAWAH
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Per hari	453,000	413,000	413,000
2	Sumatera Utara	Per hari	451,000	411,000	411,000
3	Riau	Per hari	319,000	279,000	279,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	471,000	431,000	431,000
5	Jambi	Per hari	465,000	425,000	425,000
6	Sumatera Barat	Per hari	351,000	311,000	311,000
7	Sumatera Selatan	Per hari	489,000	891,000	891,000
8	Lampung	Per hari	452,000	421,000	421,000
9	Bengkulu	Per hari	383,000	343,000	343,000
10	Bangka Belitung	Per hari	555,000	449,000	449,000
11	Banten	Per hari	678,000	502,000	502,000
12	Jawa Barat	Per hari	567,000	474,000	474,000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	760,000	542,000	542,000
14	Jawa Tengah	Per hari	426,000	303,000	303,000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	458,000	332,000	332,000
16	Jawa Timur	Per hari	442,000	398,000	398,000
17	Bali	Per hari	737,000	488,000	488,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	503,000	488,000	488,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	642,000	463,000	463,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	462,000	422,000	422,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	455,000	415,000	415,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	380,000	340,000	340,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	423,000	324,000	324,000
24	Kalimantan Utara	Per hari	393,000	373,000	373,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	490,000	450,000	450,000
26	Gorontalo	Per hari	390,000	350,000	350,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	390,000	350,000	350,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	403,000	363,000	363,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	440,000	400,000	400,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	510,000	404,000	404,000
31	Maluku	Per hari	463,000	423,000	423,000
32	Maluku Utara	Per hari	575,000	523,000	523,000
33	Papua	Per hari	482,000	442,000	442,000
34	Papua Barat	Per hari	503,000	463,000	463,000

1	2	3	4	5	6
35	Papua Barat Daya	Per hari	503,000	463,000	463,000
36	Papua Tengah	Per hari	482,000	442,000	442,000
37	Papua Selatan	Per hari	709,000	650,000	650,000
38	Papua Pegunungan	Per hari	739,000	650,000	650,000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *RESIDENCE*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON III KE BAWAH
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Per hari	1,116,000	988,000	988,000
2	Sumatera Utara	Per hari	1,126,000	922,000	922,000
3	Riau	Per hari	901,000	711,000	711,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	1,105,000	962,000	962,000
5	Jambi	Per hari	1,060,000	950,000	950,000
6	Sumatera Barat	Per hari	853,000	748,000	748,000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1,207,000	893,000	893,000
8	Lampung	Per hari	1,029,000	983,000	983,000
9	Bengkulu	Per hari	921,000	811,000	811,000
10	Bangka Belitung	Per hari	1,269,000	1,031,000	1,031,000
11	Banten	Per hari	1,608,000	1,184,000	1,184,000
12	Jawa Barat	Per hari	1,366,000	1,166,000	1,166,000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	1,753,000	1,209,000	1,209,000
14	Jawa Tengah	Per hari	1,164,000	777,000	777,000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	1,065,000	839,000	839,000
16	Jawa Timur	Per hari	1,152,000	1,021,000	1,021,000
17	Bali	Per hari	1,644,000	1,140,000	1,140,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1,303,000	1,201,000	1,201,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	1,688,000	1,065,000	1,065,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	1,079,000	969,000	969,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1,134,000	1,024,000	1,024,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	925,000	815,000	815,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1,173,000	802,000	802,000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1,115,700	1,080,000	1,080,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	1,110,000	1,000,000	1,000,000
26	Gorontalo	Per hari	952,000	842,000	842,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	964,000	854,000	854,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	986,000	876,000	876,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	1,092,000	982,000	982,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	949,000	1,068,000	1,068,000
31	Maluku	Per hari	1,101,000	991,000	991,000
32	Maluku Utara	Per hari	1,268,000	1,146,000	1,146,000
33	Papua	Per hari	1,250,000	1,140,000	1,140,000
34	Papua Barat	Per hari	1,231,000	1,121,000	1,121,000
35	Papua Barat Daya	Per hari	1,231,000	1,121,000	1,121,000
36	Papua Tengah	Per hari	1,250,000	1,140,000	1,140,000

1	2	3	4	5	6
37	Papua Selatan	Per hari	1,838,000	1,676,000	1,676,000
38	Papua Pegunungan	Per hari	1,809,000	1,676,000	1,676,000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009